

Rubrik OPINI, Jawa Pos, 13 Juni 2011

Nyontek Massal, Siapa Yang Salah?

Oleh: Chairati Saleh*

Hampir satu pekan, Jawa Pos menurunkan berita “Nyontek Massal” yang terjadi di SDN Gadel II pada ujian nasional (Unas) 10-12 Mei lalu. Fenomena ini terbongkar melalui sikap lugu Aam --salah satu siswa yang menjadi *trend setter* sontekan di sekolah tersebut—yang memberitahukan hal tersebut kepada ibunya.

Gagasan awalnya, orang tua Aam hanya komplain kepada pihak sekolah yang dianggap telah mendidik anaknya untuk berperilaku tidak jujur. Mereka mendatangi kepala sekolah, dan tidak mendapat jawaban yang positif. Kemudian orang tua Aam melanjutkan laporan ke Dewan Sekolah, dan Dinas Pendidikan Surabaya. Responnya juga sama seperti yang didapat dari pihak sekolah. Akhirnya kasus ini terbongkar lewat media massa.

Fenomena Gunung Es

Tindakan menyontek massal saat Ujian Nasional (Unas) sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Hampir dilakukan setiap tahun, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah dan atas di berbagai daerah di Indonesia. Mekanismenya bermacam-macam. Jawaban ada yang disebarkan melalui siswa-siswa yang dianggap pandai, atau melalui guru bidang studi lewat ‘les dadakan’, dan sebagainya. Fenomena nyontek massal di SDN Gadel II ini, hanya ibarat permukaan dari gunung es yang tampak, namun yang tidak terbongkar masih sangat banyak.

Dengan alasan demi keuntungan bersama dan keberhasilan anak-anak mereka, serta demi menjaga nama baik dan prestasi sekolah, maka terjadi semacam “*ijma' sukuti*” (kesepakatan bersama secara diam-diam) untuk tidak membongkar fenomena ketidakjujuran massal tersebut. Sayangnya Siami, ibu Aam, dengan lugunya tidak menyadari relitas demikian. Walhasil, ketika dia berkeluhkesah kepada sekolah, Dewan sekolah, Dinas Pendidikan, maka jawaban yang dia dapat hanya disuruh tutup mulut dengan alasan untuk kebaikan bersama. Bahkan dia malah mendapat teror dari masyarakat sekitar dan diusir dari kampung Gadel, Tandes karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah dan kampung.

Realitas ini sungguh memprihatinkan sekaligus cermin atas krisis moral yang melanda bangsa ini. Sikap anti-kejujuran untuk melindungi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tidak hanya galib dilakukan oleh elit negara, namun sudah mengakar sampai pada level masyarakat bawah. Ibarat sebuah rumah, kondisi negeri ini sudah hampir roboh. Atap dan kayu penyangganya hampir habis dimakan ‘rayap’ ketidakjujuran, dan mental hipokrit. Pada level struktural, negeri ini ‘dihancurkan’ dengan perilaku koruptif yang dilakukan oleh elit negara, sedangkan pada level kultural, negeri ini dinodai dengan tindakan-tindakan ketidakjujuran masyarakat.

Process-Based Learning

Sebenarnya negara terus berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Berkali-kali --bahkan setiap tahun-- kebijakan, undang-undang, dan kurikulum pendidikan nasional direvisi demi menghasilkan *out-put* yang baik, siswa yang berkarakter, dan generasi bangsa yang berkualitas. Namun usaha perbaikan

sistem pendidikan ini hampir belum menemukan hasil yang diharapkan. Setidaknya ini bisa dilihat dari indeks pendidikan kita pada 2011 yang masih rendah (peringkat 69) di banding negara-negara lain, seperti Brunei Darussalam (34) dan Malaysia (65). Lebih jauh lagi, pendidikan kita dianggap tidak berhasil dalam membangun negara bangsa yang berkarakter. Kasus korupsi, dan ketidakjujuran akademis yang cukup menggurita setidaknya menjadi bukti atas kegagalan tersebut.

Fullan dalam bukunya *The New Meaning of Educational Change* (2001) menyatakan bahwa inti dari keberhasilan dalam reformasi pendidikan terletak pada kualitas guru; *educational change depends on what teachers do and think* (perubahan pendidikan tergantung pada apa yang dilakukan dan dipikirkan guru). Sebaik apapun kebijakan pendidikan yang dibuat oleh negara, jika pola pikir guru tidak sejalan dengan hal itu, maka dipastikan kebijakan dan reformasi pendidikan yang diinginkan suatu negara akan terhenti di tengah jalan.

Diakui atau tidak, *mind-set* para guru dan kebanyakan masyarakat di negeri ini masih berorientasi pada hasil, bukan berbasis proses. Yang penting adalah nilai akhir, atau hasil Unas, bukan apa yang dijalani oleh siswa selama proses pembelajaran dalam satu semester. Cara berpikir demikian membuat sistem pendidikan kita terjebak dalam kualitas semu. Keberhasilan siswa dinilai dari angka-angka kuantitatif yang jelas, tapi seringkali bukan kualitas sejati. Bisa saja angka kelulusan pelajar 98%, tapi hal itu sebenarnya hasil dari kecurangan sistem ujian seperti kebocoran jawaban, nyontek massal, perjokian, dan sebagainya. Pendidikan berorientasi 'produk instan' semacam ini, juga cukup sulit untuk menanamkan nilai kejujuran. Sebab guru hanya merasa terbebani, jika anak didiknya tidak mampu menunjukkan nilai akhir yang bagus dan memuaskan. Alih-alih memperhatikan proses pembelajaran dan pendidikan secara holistik.

Pengalaman saya ketika melakukan penelitian di beberapa sekolah dasar di Australia saat studi di *Univesity of New England* (UNE), menunjukkan realitas yang berbeda. Pendidikan disana, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, lebih memperhatikan proses. Peran guru dan dosen tidak mentransformasikan ilmu saat jam pelajaran, namun juga menyediakan waktu yang luas bagi siswa untuk berkonsultasi dan berdiskusi di luar jam kelas. Bahkan secara formal, mereka juga menyediakan jam tutorial di luar jam pengajaran.

Artinya para guru dan dosen berupaya secara optimal menyediakan waktu yang luas bagi peserta didiknya untuk berkonsultasi terkait dengan bidang studi yang diampu, dan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam belajar. Mereka betul-betul membimbing siswa sesuai yang diharapkan. Namun saat tiba ujian, para guru sudah tidak ikut *cawe-cawe*. Para guru tidak perlu merasa bersalah jika siswanya tidak lulus ujian, karena mereka sudah mengabdikan seluruh waktunya selama proses pembelajaran untuk siswa. Guru bertanggungjawab mentransformasikan ilmu, mendidik, dan membimbing selama proses belajar-mengajar, sedangkan siswa bertanggungjawab atas hasil belajar yang sudah diupayakannya.

Model pembelajaran berbasis proses (*Process-Based Learning*) semacam ini yang semestinya diterapkan di negara ini, jika pendidikan kita betul-betul diorientasikan untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Penghargaan tidak hanya diberikan kepada siswa mendapatkan nilai baik, namun juga mereka yang berprestasi dalam hal kerajinan, kedisiplinan, keaktifan, dan yang kreatif.

Nilai akhir belajar memang penting, tapi proses pembelajaran jauh lebih penting. Kita harus yakin bahwa sistem pendidikan yang baik, tempat kerja dan guru yang profesional akan mempertahankan dan menghasilkan orang-orang yang berkualitas baik.

Wallahu a'lam bi al-shawab

****Chairati Saleh, S.Ag.,M.Ed adalah Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), IAIN Sunan Ampel Surabaya.***